

MEWASPADAI JEBAKAN PANGAN (FOOD TRAP) Suatu Pengantar

Purwiyatno Hariyadi, Dahri Syah, Nuri Andarwulan

Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi
Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor

"Whether one speaks of human rights or basic human needs, the right to food is the most basic of all. Unless that right is first fulfilled, the protection of the other human rights becomes a mockery for those who must spend all their energy merely to maintain life itself..." (Presidential Commission on World Hunger, 1980).

PANGAN adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa adanya pangan. Karena itu, usaha pemenuhan kebutuhan pangan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar. Dalam kaitan ini, penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang baru ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia 4 November 1996 lalu, bahkan secara tegas menyatakan bahwa "Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat". Sebaliknya, konsep bahwa kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia bukan merupakan konsep yang baru. Konsep pangan dan gizi sebagai hak asasi ini tercantum pada deklarasi HAM yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948; lebih dari 50 tahun yang lalu.

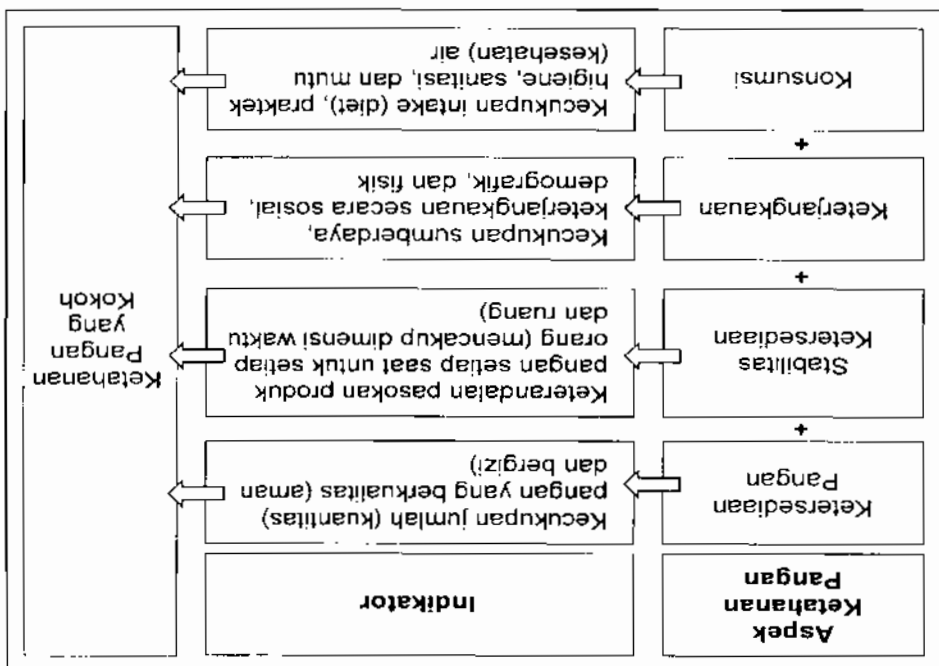
Pada saat kita sekarang ini, dimana berbagai pihak gencar mengadvokasikan dan memperjuangkan perlindungan dan penegakkan HAM yang berhubungan dengan kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpolitik, maka seharusnya pada saat yang sama mengadvokasikan dan memperjuangkan pula perlindungan dan penegakkan hak asasi yang paling asasi itu, yaitu hak untuk bebas dari kelaparan, bebas dari kurang gizi. Perlu diingat pula bahwa pelanggaran hak atas pangan (*the right to food*) ini mempunyai dampak yang panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

Secara nasional, pangan mempunyai peranan sangat penting dan kritis sebagai salah satu komponen ketahanan nasional suatu bangsa. Kondisi kemampuan suatu negara untuk pemenuhan kebutuhan pangannya dinyatakan dengan istilah ketahanan pangan (*food security*). Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan batasan yang dipakai oleh *the World Food Summit* (1996) pada saat mencetuskan **FIVIMS** (*Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems*) adalah bahwa ketahanan pangan yaitu suatu kondisi dimana semua orang, setiap waktu, mempunyai akses fisik, sosial dan ekonomi pada bahan pangan yang aman dan bergizi sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh; sesuai dengan kepercayaan mereka sehingga bisa hidup secara aktif dan sehat.

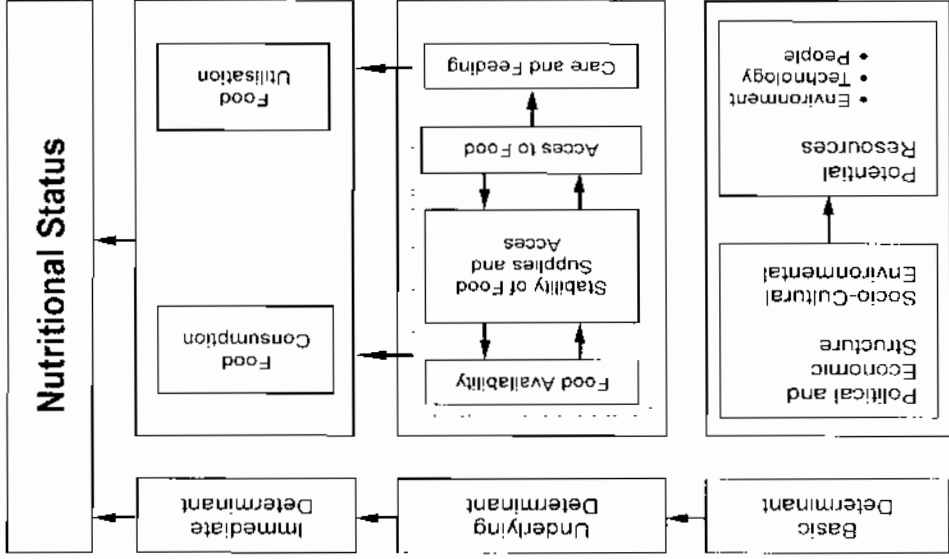
Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan (*food security*) maka topik jebakan pangan (*food trap*) ini erat hubungannya dengan *food insecurity*. Pada dasarnya, terdapat 4 aspek utama ketahanan pangan; yaitu (i) aspek ketersediaan pangan (*food availability*), (ii) aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (*stability of supplies*), (iii) aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan aspek konsumsi (*food utilization*). Dalam membangun ketahanan pangan nasional, keempat aspek ketahanan pangan tersebut saling terkait satu sama lain, sebagaimana dijelaskan pada skema pada Gambar 1.

Terlihat jelas bahwa kondisi ketahanan pangan nasional suatu negara tersebut sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah; baik itu berupa komitmen sosial, budaya, politik, dan ekonomi nasionalnya. Karena itu, analisis mendasar tentang sistem ketahanan pangan nasional suatu negara sangat terkait dengan sistem sosial, budaya, politik dan ekonomi nasionalnya; dimana kaitannya dengan ketahanan pangan dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja konseptual sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Dengan kata lain, sistem sosial politik dan ekonomi suatu negara; akan sangat memengaruhi kondisi ketahanan pangan nasionalnya dan karena itu pula; memengaruhi pula kondisi keterjebakan pangan (*food trap* atau *food*

Gambar 1. Aspek ketahanan pangan



insecurity). Karena pentingnya dalam menentukan ketahanan pangan atau keterjebakan pangan, maka dalam kerangka kerja konseptual ketahanan pangan, struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi ini disebut sebagai faktor determinan dasar (*basic determinant*) bagi ketahanan pangan.



Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual Ketahanan Pangan Nasional (FVIMS, 1988).

Dari Gambar 2 pula bisa terlihat bahwa komitmen pemerintah ini dianggap sebagai *basic determinant*; suatu kebijakan dasar yang melandasi program ketahanan pangan nasional atau pada kondisi jebakan pangan. Komitmen pemerintah untuk menangkali jebakan pangan ini akan tercermin pada pilihan-pilihan kebijakan pangan yang diambilnya. Kebijakan untuk pejaminan ketersediaan dan pemenuhan

kebutuhan pangan ini dapat dicapai baik dengan memproduksi sendiri atau mendatangkannya dari luar (impor). Salah satu komitmen penting pemerintah yang diperlukan adalah **komitmen untuk tidak dengan mudah melakukan impor pangan**. Komitmen tegas ini penting, khususnya dalam rangka mewaspada dan menangkal jebakan pangan. Komitmen untuk tidak dengan mudah melakukan impor pangan ini perlu dibarengi dengan **komitmen untuk memanfaatkan sumberdaya indigenous**. Dalam jangka panjang, kedua komitmen kebijakan besar ini merupakan prasyarat terciptanya kemandirian pangan; ketahanan pangan, terbebas dari jebakan pangan.

Diskusi ini mengajak kita untuk selalu menyadari bahwa salah satu isu penting yang perlu dicermati dan diperdebatkan adalah mengenai adanya peluang bagi Indonesia untuk jatuh ke dalam jebakan pangan (*food trap*) jika pilihan kebijakannya semata-mata bermuara pada penyediaan yang bertumpu pada impor. Jebakan pangan yang dimaksud yaitu suatu kondisi dimana suatu negara mempunyai ketergantungan yang sangat kuat terhadap impor pangan. Jebakan pangan juga mengandung pengertian ketidakmampuan sarana dan prasarana produksi pangan dalam negeri untuk bersaing dengan bahan pangan produksi impor. Dan pada tingkat ekstrim, jebakan pangan akan menyebabkan terenggulnya keluasaan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, karena beban biaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap impor akan semakin besar.

Jebakan pangan pada tahap awal ditandai dengan membunjanya produk pangan impor dengan harga yang murah. Harga murah ini sering dikemas dengan baik sekali melalui kebijakan subsidi, ataupun dalam kerangka promosi jangka panjang. Ketidakmampuan bersaing dengan harga yang murah ini menyebabkan banyak pelaku bisnis dan pengambil kebijakan mengambil jalan pintas jangka pendek; yaitu memilih "memanen langsunng dari pelabuhan import" daripada bersusah-susah "memanen dan memanen dilahan kita sendiri" (baca: membangun sistem pangan nasional yang kokoh). Kondisi demikian mengakibatkan semakin tidak efisienya sistem produksi pangan dalam negeri, dan pada gilirannya nanti akan menyebabkan tidak terpakainya sarana dan

prasarana produksi selama beberapa masa siklus produksi. Yang terjadi kemudian adalah kemandekan produksi dalam negeri.

Hal ini tidak seharusnya terjadi jika sistem ketahanan pangan yang dibangun adalah sistem yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal. Namun demikian, upaya membangun sistem ketahanan pangan "berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan", kelembagaan dan budaya lokal" ini semakin terasa berat (semakin terjebak?) dengan kondisi Indonesia yang semakin terpuruk (baca: terjebak).

Dalam kerangka krisis misalnya sering masuknya pangan import (berikut budaya makan pangan import) ke Indonesia melalui suatu skenario "bantuan pangan". Bisa dibayangkan bahwa selama masa atau periode "bantuan" tersebut sesungguhnya telah terjadi proses pembelajaran konsumen untuk menyukai produk import. Hal ini telah pula menyebabkan mulai tersingkirnya produk pangan dan budaya pangan asli (*indigenous*) Indonesia. Potensi produksi pangan asli menjadi tidak atau kurang terurus, keragaman sumberdaya bahan, kelembagaan dan budaya pangan lokal menjadi terabaikan, dan tragisnya beberapa bahkan "terkurus" keluar.

Karena itu diperlukan suatu pijakan dasar yang komprehensif bagi pengembangan kebijakan dalam bidang pangan nasional, khususnya untuk mengantisipasi adanya peluang jebakan pangan yang semakin kuat. Dan untuk itu, perlu segera dikampanyekan perlunya suatu kesadaran bersama (*awareness*) yang tinggi tentang pentingnya pangan (ketersediaan, mutu dan keamanan) bagi ketahanan pangan nasional Indonesia.

Disamping itu, perlu pula dilakukan tinjauan komprehensif dan apresiasi yang proporsional mengenai potensi pangan asli Indonesia yang kaya dengan keragaman sumberdaya bahan pangan berikut kelembagaan dan budaya pangan lokalnya. Karena itulah maka peranan media juga sangat besar, khususnya untuk memunculkan suatu kesadaran luas untuk melestarikan, menjaga dan

mengembangkan potensi-potensi kekayaan bangsa dalam bidang pangan asli; dalam rangka membangun ketahanan nasional yang lebih kokoh dan mandiri. Semogail!

Rangkuman Hasil Diskusi Panel
"Kebijakan Pangan untuk Menangkal Jebakan Pangan (Food Trap)"
Jakarta 1 Nopember 2001